

TATA KELOLA KOLABORASI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ryan Pranugie Harianja
NPP. 31.0168

Asdaf Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: ryan02harianja@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Jamaruddin, M.AP, Ph.D

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Author focuses on the problem of poverty alleviation with collaborative governance because there is an increase in the number of poor people and the poverty line in Indragiri Hulu Regency. **Purpose:** The aim of this research is to analyze and find out how collaborative governance is in alleviating poverty in Indragiri Hulu Regency. **Method:** This research uses qualitative research methods and the constructivism paradigm according to Creswell. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. **Results:** The author finds that collaborative governance between government and academics is running well because the dimensions of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, mutual understanding and existing intermediate results show that there is a strategy in poverty alleviation efforts, namely the implementation of the Service System and Integrated Reference in helping poor communities. **Conclusion:** The collaborative governance process in alleviating poverty in Indragiri Hulu Regency is going well, this is because there is collaboration between the government and academics in determining strategies or policies in alleviating poverty in Indragiri Hulu Regency.

Keywords: Collaborative Governance; Poverty Alleviation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pengentasan kemiskinan dengan tata kelola kolaborasi karena terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. **Tujuan:**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tata kelola kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan paradigma konstruktivisme menurut Creswell. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penulis menemukan bahwa tata kelola kolaborasi antara pemerintah dan akademisi berjalan dengan baik karena dimensi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil antara yang ada menunjukkan adanya strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan yakni dengan pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dalam membantu masyarakat miskin. **Kesimpulan:** Proses tata kelola kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam menentukan strategi atau kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaborasi; Pengentasan Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia dan keseimbangan planet bumi, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 tujuan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*). Hal ini merupakan komitmen terhadap proses yang dipegang oleh 193 negara anggota PBB yang juga melibatkan masyarakat sipil, ilmuwan, pihak swasta, dan kelompok filantropis. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun adalah tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals*. Tren global ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara di seluruh dunia dan perlu ditangani secara menyeluruh, terintegrasi dan inklusif yang sejalan dengan dokumen PBB yaitu *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable*, bahwa cara yang digunakan untuk mengakhiri kemiskinan adalah dengan melibatkan kemitraan kolaboratif (*United Nations*, 2015). Secara lebih lengkap Rittel mengatakan kemiskinan adalah masalah social dan kultural yang kompleks, sering disebut sebagai *wicked prolem* atau masalah yang rumit karena berbagai faktor (Rittel, 1973). Sifat kemiskinan

yang multidimensional karena terhubung erat dengan aspek pendidikan, kesehatan, gizi dan keterampilan kerja menyebabkan penyelesaiannya perlu tata kelola yang melibatkan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak. Ansell & Gash, 2007 mendefinisikan tata kelola kolaborasi sebagai sebuah tata kelola yang mengatur interaksi antara satu atau lebih lembaga publik dengan pihak swasta atau pihak ketiga sebagai pemangku kepentingan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang resmi, berfokus pada pencapaian kesepakatan bersama, melalui musyawarah, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan public serta mengelola program atau aset public.

Kabupaten Indragiri Hulu dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan yang signifikan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indragiri Hulu pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin berjumlah 26.660 jiwa yang mengalami peningkatan pada 2021 dan menyentuh angka 27.350 jiwa hingga pada 2022 lalu jumlah penduduk miskin di Indragiri Hulu mencapai angka 27.460 jiwa. Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan, garis kemiskinan di Indragiri Hulu juga mengalami kenaikan yakni pada September 2022 Garis Kemiskinan menyentuh angka Rp582.910,- per kapita per bulan yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp549.563,- pada tahun 2021 dan Rp552.110,- pada tahun 2020 (BPS InHu, 2023). Perbandingan dalam aspek Garis Kemiskinan Indonesia secara keseluruhan memperlihatkan bahwa keadaan Indragiri Hulu lebih sulit karena Garis Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 adalah sekitar Rp486.168 dan naik menjadi Rp535.547 pada tahun 2022 (BPS Indonesia, 2023). Namun, Garis Kemiskinan di Indragiri Hulu tetap berada di atas Garis Kemiskinan Nasional yang menciptakan keadaan untuk segera ditangani.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indragiri Hulu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Orang Tidak Mampu dan Terlantar yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan program ini penulis menemukan adanya jejak awal kolaborasi antara pemerintah kabupaten Indragiri Hulu dengan Akademisi dalam pembuatan regulasi. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana proses kolaborasi berlangsung dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu “Indragiri Hulu Sejahtera” yang didalamnya mengatur kolaborasi antar *stakeholders* untuk melaksanakan identifikasi kebutuhan maupun keluhan masyarakat miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Indragiri Hulu. Kebijakan ini dijalankan pemerintah dengan berkolaborasi lintas sektor antara dinas pemberdayaan masyarakat desa, dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Tak hanya itu kelembagaan yang dibuat pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah kabupaten/kota yang mencakup seluruh sektor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk berkolaborasi bersama mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah. Dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintah juga melakukan kolaborasi dengan lembaga kemasyarakatan desa yang berfokus pada pembinaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pengentasan kemiskinan dalam program gerbangsari ini memiliki tujuh program yakni pembinaan masyarakat sadar pembangunan ekonomi desa (Bakti Desa), pembinaan masyarakat dalam hal produktivitas kebun desa (PAD Desa), pembinaan keterampilan ibu-ibu desa dalam organisasi PKK (Iptek Desa), pembinaan aparatur pemerintahan desa (Abdi Desa), pembinaan masyarakat tentang pelestarian lingkungan pedesaan (Desa Bersih), pembinaan pengalokasian anggaran dana desa (ADD Desa) dan pembinaan pelaksanaan dana usaha ekonomi kerakyatan desa (UEK-D). Kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta seperti dengan perusahaan yang ada di Indragiri Hulu berupa *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bagi masyarakat. Pemberian modal banyak dilakukan kepada peternak telur dan insentif dalam bidang pendidikan yang berbentuk pemberian beasiswa kepada beberapa peserta didik tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Semua upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan ini bertujuan

untuk pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu yang tertuang dalam visi misi pemerintah kabupaten Indragiri Hulu yang ingin menciptakan masyarakat yang sejahtera dan menurunkan kemiskinan hingga nol persen. Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, penulis menemukan adanya gambaran singkat mengenai dimensi yang mendukung terwujudnya tata kelola kolaborasi sesuai pendapat Ansell and Gash. Namun, intisari dari tata kelola kolaborasi yakni dimensi proses kolaborasi yang dimulai dari dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil antara yang terjadi, penulis belum menemukan gambaran jelas mengenai proses ini baik pada artikel, berita, maupun jurnal yang membahas pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga melalui penelitian ini penulis ingin menganalisis proses kolaborasi yang terjadi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai kemiskinan baik dalam konteks strategi pengentasan maupun dalam tata kelola kolaborasi. Penelitian oleh I Wayan Mudana berjudul Kolaborasi Masyarakat Ekonomi, Politik, dan Sipil dalam Pengembangan Pariwisata Bahari untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Bali (Mudana, 2020). Penelitian menemukan sebuah model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis sosial budaya. Bentuk penguatan modal komunitas yang dilakukan melalui proses sosialisasi, pendampingan dan pemberian bantuan finansial. Penelitian Eka Putra, Nova Elsyra dan Muchamad Zaenuri berjudul Tata Kelola Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta : Program Gandeng-Gendong (Putra et al., 2020) menghasilkan bahwa *collaborative governance* yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong telah memberikan kepastian lapangan kerja, masyarakat dibekali *softskill* dan *hardskill* sehingga perekonomian meningkat dengan baik. Namun disamping banyaknya manfaat dari kehadiran program ini juga terdapat sisi kelemahan dari para *stakeholders* yaitu minimnya sosialisasi program, pelatihan dan pemberdayaan sehingga berefek pada buruknya pelaksanaan program tersebut.

Penelitian Salma Arum Hidayah dan Rutiana Dwi Wahyunengseh berjudul *Collaborative Governance* untuk Pengembangan *Sustainable Green Tourism* sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (*Discourse Network Analysis* pada geopark.kebumenkab.go.id) menemukan representasi *collaborative governance* untuk pengembangan *sustainable green tourism* sebagai upaya pengentasan kemiskinan bahwa *Collaborative governance* pada teks berita di website geopark.kebumenkab.go.id direpresentasikan oleh kalimat-kalimat yang membawa wacana kerja sama antar aktor atau *multi-stakeholder*. Kalimat-kalimat tersebut dapat diidentifikasi melalui beberapa kata kunci seperti “sinergi” (termasuk bersinergi, sinergitas), “kerja sama”, “kemitraan”, “*multistakeholder*”, dan “dukungan”. Ada 27 kalimat maupun pernyataan dari aktor yang merepresentasikan wacana *collaborative governance* dalam teks berita. Setelah dilakukan penyederhanaan dan pemilihan kesamaan inti kalimat, peneliti menemukan ada 22 kalimat yang merepresentasikan wacana *collaborative governance* (Arum Hidayah & Dwi Wahyunengseh, 2021).

Penelitian Rina Parlina yang berjudul *Tata Pemerintahan yang Baik dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan* (Sistematik Literatur Review) menemukan bahwa penelitian tentang tata pemerintahan yang baik dan kolaborasi pemerintahan merupakan kajian ilmu pemerintahan dan setelah dianalisis maka dari 1000 penelitian dan diseleksi menjadi 790 penelitian dengan 5 kluster dan 40 item sejak tahun 2017 dan 2022 dapat dikatakan sangat sering dilakukan penelitian tentang pemerintahan dan tata kelola sedangkan semakin berkembang penelitian ke *collaborative governance* dan CSR. Dapat disimpulkan bahwa tata pemerintahan yang baik harus disertai dengan kolaborasi semua pihak dan adanya keterlibatan perusahaan/bisnis dalam CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Parlina, 2022).

Penelitian oleh Nur Handayani, Riza Risyanti, Suropto dan Fernandes Simangunsong berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur (Handayani et al., 2023). Penelitian ini menunjukkan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Bangkalan tidak efektif dilihat dari kondisi awal, design institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi disebabkan belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin. Bupati selaku penanggung jawab dan para

pemangku kepentingan yang tergabung dalam TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan merujuk pada kerangka kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dipandang perlu adanya penyamaan persepsi tentang standar masyarakat miskin di tingkat pusat dan daerah serta sinkronisasi data masyarakat miskin secara periodik sehingga terjamin kevalidannya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tata kelola kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan pihak Akademisi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme yang berbeda dengan penelitian Mudana, Eka Putra dkk, Nur Arum Hidayah dkk, Rina Parlina maupun Handayani dkk. Selain itu, indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni dengan menggunakan pendapat Ansell & Gash yang berfokus pada proses kolaborasi dimana Ansell & Gash menyatakan bahwa proses tata kelola kolaborasi dapat terjadi apabila lima dimensi yang ada terpenuhi yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil antara (Ansell & Gash, 2007).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan akademisi dalam pengentasan kemiskinan serta mengetahui hal yang menjadi penghambat dalam kolaborasi yang dilakukan pemerintah dan akademisi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme Creswell yakni akan melakukan pemaknaan dari beragam partisipan baik itu dari pihak dinas social, bappeda maupun akademisi serta konstruksi sosial historis yang terjadi selama kolaborasi berlangsung. Penelitian juga menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala yang tidak membutuhkan kuantifikasi (Creswell,

2018). Nurdin dan Hartati memaparkan mengenai metode pengumpulan data ialah suatu metode/teknik/cara yang digunakan penulis dalam pengumpulan data baik melalui wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi dan lain sebagainya (Nurdin & Hartati, 2019).

Data merupakan data utama dari banyaknya fakta empiris yang diolah oleh penulis menjadi satu untuk menyelesaikan permasalahan maupun menjawab pertanyaan penelitian (Simangunsong, 2016). Data yang penulis gunakan berupa *Person* (orang), *Place* (tempat baik dalam keadaan bergerak maupun diam), dan *Paper* (dokumen, angka, simbol maupun gambar) (Rahmadi, 2011). Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dan nantinya data akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis triangulasi data. Analisis triangulasi data dikaji dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses merangkum, memilih, dan fokus pada hal yang menjadi inti atau pokok penting, juga mencari bentuk tema bahkan pola dari data yang didapatkan. Penyajian data adalah cara penulis untuk menampilkan data yang telah diolah yang dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori maupun hal lain yang sejenis. Pada umumnya merupakan tahap akhir setelah data ditampilkan. Kesimpulan ditarik untuk memberikan interpretasi atas hasil temuan berdasarkan data wawancara maupun dokumen yang ditemukan (Miles et al., 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis tata kelola kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan teori tata kelola kolaborasi Ansell & Gash bahwa proses tata kelola kolaborasi dapat dinilai terlaksana dengan baik apabila memenuhi lima dimensi, yakni dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil antara. Hasil dan pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Dialog Tatap Muka

Penulis melakukan wawancara pada sampel di Bappeda, Dinas Sosial dan Pihak Akademisi yang menghasilkan bahwa dialog tatap muka yang dilakukan antara

pemerintah dan pihak akademisi berjalan dengan kondusif. Yang menjadi permasalahan hanyalah dialog tatap muka antar instansi pemerintah yang masih berjalan dengan kurang baik. Berdasarkan pernyataan yang ada, masih ada ego sektoral dari masing-masing instansi pemerintah. Dari hal ini, penulis simpulkan bahwasanya proses kolaborasi antara pemerintah dan akademisi pada dimensi dialog tatap muka berjalan dengan baik dan kondusif.

3.2 Pembangunan Kepercayaan

Penulis melakukan wawancara pada sampel di Bappeda, Dinas Sosial dan Pihak Akademisi yang menghasilkan bahwa pembangunan kepercayaan yang dilakukan antara pemerintah dan pihak akademisi berjalan dengan baik dari dimensi pembangunan kepercayaan. Hal ini karena akademisi yang begitu terbuka akan semua ide maupun gagasan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Menurut penulis, transparansi dan keterbukaan yang telah dilakukan pemerintah dan akademisi adalah pondasi utama untuk pembangunan kepercayaan. Namun, dalam internal pemerintah sendiri antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terdapat perbedaan data karena pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial. Berhadapan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial mereka tidak dapat bertindak lebih lanjut karena komunikasi ke atas sering kali tidak membuahkan hasil dan tidak memiliki tindak lanjut.

3.3 Komitmen Terhadap Proses

Penulis melakukan wawancara pada sampel di Bappeda, Dinas Sosial dan Pihak Akademisi yang menghasilkan bahwa komitmen terhadap proses antara pemerintah dan pihak akademisi bisa dinilai sudah berjalan dan berlaku sesuai dengan apa yang disepakati. Efek positif yang terjadi tidak hanya sebatas pada pelaksanaan tugas masing-masing pihak namun, juga pada terciptanya ide maupun gagasan dalam pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu yang diharapkan dapat berkontribusi dalam penurunan kemiskinannya.

3.4 Pemahaman Bersama

Penulis melakukan wawancara pada sampel di Bappeda, Dinas Sosial dan Pihak Akademisi yang menghasilkan bahwa kesepakatan mengenai hal-hal kemiskinan sudah disepakati bersama yakni dengan mengikuti aturan dari kementerian sosial. Sehingga pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan pemerintah pusat. Kesepakatan ini semakin diperkuat dengan adanya SK Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan yang memperjelas visi misi dan tupoksi dari tim dalam pengentasan kemiskinan.

3.5 Hasil Antara

Penulis melakukan wawancara pada sampel di Bappeda, Dinas Sosial dan Pihak Akademisi yang menghasilkan bahwa hasil antara yang dicapai dalam kolaborasi yang dilakukan ialah terbentuknya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Indragiri Hulu serta terciptanya beberapa strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh pihak Bappeda.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kolaborasi antar pemerintah maupun kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi penulis simpulkan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kolaborasi untuk menentukan sistem yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu yang dibuktikan dengan berjalannya semua dimensi tata kelola kolaborasi menurut Ansell dan Gash dengan baik. Bentuk kolaborasi pemerintah dengan akademisi dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 1. Bentuk Kolaborasi Pemerintah dengan Akademisi

| Aktor yang Terlibat | Bentuk Kolaborasi |
|-----------------------------|---|
| Pemerintah dengan Akademisi | Akademisi membantu menentukan sistem yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu yakni dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. |

Dalam pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu, pemerintah belum berkolaborasi dengan pihak swasta / perusahaan swasta. mengenai

pemerintah maupun perusahaan swasta belum ada menawarkan semacam penawaran kerjasama untuk berkolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Indragiri Hulu. Sehingga kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta belum terjalin dengan baik. Penulis berpendapat bahwa bukan hanya inisiatif dari dinas atau badan atau perusahaan saja yang diperlukan, namun dalam hal ini kepala daerah atau Bupati Indragiri Hulu lebih aktif lagi untuk mengajak perusahaan yang ada di wilayah kepemimpinannya untuk berkontribusi dalam penanganan kemiskinan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa, tata kelola kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi sudah berjalan dengan baik. Karena dalam menentukan sistem pengentasan kemiskinan, pemerintah meminta pendapat atau gagasan dari akademisi yang paham akan bagaimana strategi yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Terlebih pada dimensi yang dikemukakan oleh Ansell & Gash sudah berjalan dengan baik. Sehingga pemerintah dan akademisi menghasilkan strategi pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk melayani kebutuhan dan membantu masyarakat yang tergolong dalam kriteria miskin.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian juga dilakukan hanya berfokus pada kolaborasi antara pemerintah dan akademisi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa dengan adanya temuan penelitian yakni belum adanya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, maka dari itu penulis menyarankan untuk dapat dilakukan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan terutama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan

penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arum Hidayah, S., & Dwi Wahyunengseh, R. (2021). Collaborative Governance Untuk Pengembangan Sustainable Green Tourism Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Discourse Network Analysis pada geopark.kebumenkab.go.id). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design (Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches)* (Fifth). SAGE Publications, Inc.
[file:///E:/Documents/dosen/buku
Metodologi/\[John_W._Creswell\]_Research_Design_Qualitative,_Q\(Bookos.org\).pdf](file:///E:/Documents/dosen/buku%20Metodologi/[John_W._Creswell]_Research_Design_Qualitative,_Q(Bookos.org).pdf)
- Handayani, N., Risyanti, R., & Simangungsong, F. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–77. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3329>
- Hulu, B. I. (2023). Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu dalam Angka 2023. In *BPS Kabupaten Indragiri Hulu*.
- Indonesia, B. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*. 07.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2008). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, Inc.
- Mudana, I. W. (2020). KOLABORASI MASYARAKAT EKONOMI, POLITIK, DAN SIPIL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR DI BALI. *Candra Sangkala*, 1(2).
<https://doi.org/10.23887/jcs.v1i2.28764>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
<https://docplayer.info/166190391-Metodologi-penelitian-sosial-dr-drs-ismail-nurdin-m-si-dra-sri-hartati-m-si.html>

Parlina, R. (2022). *Tata Pemerintahan yang Baik dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Sistematik Literatur Review)*. 5(1), 58–68.

<https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1>

Putra, E., Elsyra, N., Zaenuri, M., Muhammadiyah Yogyakarta, U., & Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, S. (2020). TATA KELOLA KOLABORASI DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA : PROGRAM “GANDENG-GENDONG.” *Jurnal Tata Sejuta*, 6(2). <http://ejournalstiamataram.ac.id>

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

Rittel, H. ; W. M. (1973). *Dilemmas in a General Theory of Planning*. 2.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

United Nations. (2015). 70/1. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Preamble*.

